

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Menurut (Fahrudin, 2014) Menjelaskan Bahwa Kesejahteraan Sosial diartikan suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Kesejahteraan Sosial dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran W.J.S Poewodarminto (Adi,2015) bahwa:

“Kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai segala macam gangguan masalah atau kesukaran dan sebagainya. Gangguan masalah ini meliputi dari berbagai aspek yaitu gangguan kesehatan, gangguan pendidikan, gangguan kerja dan sebagainya.”

Sedangkan menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial “Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Kesejahteraan sosial selain merupakan suatu ilmu dibidang sosial yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat dan juga keberfungsian sosialnya, kesejahteraan sosial juga memiliki tujuan umum. Dikutip dalam Fahrudin (2014:10) Tujuan kesejahteraan sosial adalah:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan
3. masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Definisi lain kesejahteraan sosial menurut Huraerah (2008: 153) kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan atau sekumpulan kegiatan yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang bermasalah. Definisi ini menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah upaya dalam membantu orang-orang yang memiliki permasalahan dalam keberfungsian sosialnya agar fungsi sosialnya dapat kembali berjalan dengan sebagaimana mestinya dan juga membantu untuk memudahkan akses yang terdapat pada lembaga.

2.1.2 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi kesejahteraan sosial untuk memperbaiki secara progressif dari kondisi kehidupan seseorang melalui pengembangan sumber daya manusia dengan penggunaan, penciptaan sumber komunitas, penyediaan struktur institusional untuk berfungsinya pelayanan yang terorganisasi dan pembangunan yang berorientasi terhadap perubahan sosial. Adapun fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlender dan Apte yang dikutip oleh (Fahrudin, 2014) yaitu sebagai berikut ini:

a) Fungsi Pencegahan (Preventive)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya

pengecehan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakn pola- pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

b) Fungsi Penyembuhan (Curative)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosi, dan sosial agar yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

c) Fungsi Pengembangan (Development)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d) Fungsi Penunjang (Supportive)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang kesejahteraan sosial yang lain.

Dari pengertian di atas bahwa fungsi kesejahteraan sosial untuk membantu proses pertolongan baik individu, kelompok, dan masyarakat agar dapat berfungsi kembali dengan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, serta terhindar dari masalah- masalah sosial baru dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan dari terjadinya perubahan-perubahan sosial ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, fungsi-fungsi kesejahteraan sosial untuk pencegahan masalah sosial yaitu mendorong individu, keluarga, dan masyarakat untuk berupaya agar mereka tidak masuk kedalam masalah sosial yang berdapak kepada kehidupan contohnya kemiskinan, kekerasan, traumatik, penyimpangan sosial, fungsi kesejahteraan sosial untuk fungsi penyembuhan jika individu,

keluarga ataupun masyarakat dalam kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosi, dan sosial untuk menyelesaikan masalah dikehidupannya kesejahteraan sosial hadir dengan memfungsikan sosial, metode-metode, teknik-teknik yang diberikan guna memberikan perubahan dan pemulihan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Kesejahteraan sosial juga berfungsi untuk pengembangan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat.

2.1.3 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Seperti yang telah di jelaskan diatas tentang pengertian kesejahteraan sosial juga kesejahteraan sosial mempunyai tujuan menurut (Fahrudin, 2014) yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Dari pengertian di atas dapat diuraikan untuk untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat harus terpenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, papan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungan agar mendukung terhadap aktivitas-aktivitas sosial masyarakat untuk mengembangkan potensi hidup dengan menggali sumber-sumber yang berguna untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

2.2 Pekerjaan Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pengertian dari pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas profesional dalam menolong individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan atau memperbaiki kapasitas masyarakat agar berfungsi sosial yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif guna terwujud suatu tujuan. Sebagai aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasari oleh body of knowledge (kerangka pengetahuan), body of skills (kerangka keahlian), dan body of values (kerangka nilai). Ketiga komponen tersebut dikembangkan dari beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, ekonomi, dan politik.

Dari pengertian di atas, tercermin bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia (people) dengan lingkungannya, yang mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial guna meningkatkan taraf hidup (human wellbeing) masyarakat. Di sini tergambar bahwa, dalam perkembangan praktek pekerjaan sosial disiplin ilmu Psikologi dan Sosiologi memiliki peranan penting.

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang mempunyai tanggung-jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar orang, sehingga orang tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas kehidupan untuk mengatasi kesulitan yang dialami dan mewujudkan aspirasi serta nilai-nilai. Konsep ganda sumber daya dan interaksi dengan lingkungan sosial digunakan untuk menjelaskan tujuan pekerjaan sosial dan aktivitas praktisi. Pekerjaan sosial dapat dipandang sebagai profesi generalis, tetapi istilah “generalis” dan “spesialis” tidak boleh disamakan dengan praktik awal dan lanjutan (Andari, 2020).

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah seseorang yang berusaha memberikan pelayanan secara profesional guna membantu individu-individu untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Tugas-tugas yang harus mereka emban yang dapat membedakan dengan seorang pekerja sosial profesi lain. Menurut Iskandar (2013, hlm 30) fungsi dasar seorang pekerja sosial di dalam sistem kesejahteraan social adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Di dalam fungsi ini maka dapat dilakukan upaya pelayanan sosial, perencanaan kesejahteraan sosial, perbikan dan pemeliharaan penghasilan, administrasi kesejahteraan sosial dan aksi sosial.
2. Menjamin standar subsestensi kesehatan dan kesejahteraan yang memadai bagi warga, yang mencakup tugas-tugas sebagai berikut:
 - a) Mengembangkan sumber-sumber manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar individu maupun kelompok,
 - b) Mendistribusikan dan pemeratakan alokasi sumber-sumber ekonomi maupun sosial,
 - c) Melindungi individu maupun keluarga dai bahaya-bahaya kehidupan dan membantu mereka yang mengalami bencana, kecacatan, ketidakmampuan fisik maupun mental dan sebagainya.

Menurut Sugeng Pujileksono, dkk (2018, hlm 20) fungsi pekerja social diantaranya :

1. Mengembangkan, mempertahankan dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamain terpenuhinya standard kehidupan yang layak bagi semua orang.
3. Memungkinkan seseorang berfungsi sosial secara optimal.

4. Memberikan dukungan dan meningkatkan kemampuan tatanan sosial dan struktur institusional masyarakat.
5. Membantu memfungsikan dan mengembangkan pelayanan institusi sosial.
6. Mengimplementasikan standarisasi adaptasi sosial dan perubahan yang terukur sehingga tercipta stabilitas sosial.
7. Mencegah dan mengatasi konflik sosial dan masalah sosial.
8. Mengelola dan mengendalikan penyimpangan perilaku dan disorganisasi sosial.

2.2.3 Metode-Metode Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial dalam prakteknya menggunakan metode perubahan sosial yang terencana. Metode Pekerjaan Sosial adalah suatu prosedur kerja yang teratur dan dilaksanakan secara sistematis digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial. Di dalam pekerjaan sosial ada beberapa metode yang digunakan untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahannya. Menurut (Adi, 2015) Metode yang digunakan oleh Pekerjaan Sosial adalah sebagai berikut sebagai berikut:

a. Social Casework (terapi individu dan kelompok)

Metode perubahan sosial terencana pada individu dan keluarga atau kelompok pada dasarnya adalah suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan yang mempunyai masalah. Menurut Skidmore, Thackeray dan Farley dalam (Adi, 2015) menggambarkan proses casework menjadi empat tahapan, adalah sebagai berikut:

1. Tahap penelitian, pada tahap ini klien mulai menjalani relasi dengan caseworker. Pada tahap ini selain mengumpul dan memilah data klien yang dapat dijadikan pegangan dalam proses pertolongan.

2. Tahap pengkajian, dari pengkajian yang dilakukan diharapkan akan menghasilkan berbagai macam bentuk terapi.
3. Tahap intervensi, dalam tahapan ini sebenarnya sudah diawali dengan pertemuan awal dengan klien. Hal ini karena proses penelitian sudah dapat dikatakan sebagai treatment ketika proses ini sudah membantu klien untuk dapat mengklarifikasi permasalahannya dan berusaha melakukan perubahan kondisi kehidupan.
4. Tahap terminasi, fase ini merupakan tahapan di mana relasi antara caseworker dan klien akan dihentikan.

Berdasarkan definisi di atas metode ini diperuntukkan kepada seorang individu yang dalam kehidupannya mengalami masalah sosial. Seorang pekerja sosial harus bisa menggali dan menangani masalah yang didapat individu tersebut melalui pendekatan untuk mengembangkan dan memecahkan masalah individu tersebut.

b. Social Group Work (Bimbingan Sosial Kelompok)

Metode perubahan sosial terencana pada kelompok disebut dengan metode groupwork. Bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok. Menurut Skidmore, Tharckeray dan Farley dalam (Adi, 2015) menyatakan groupwork sebagai:

A method of working with people in groups (two or more people) for the enhancement of social functioning and for the achievement of socially desirable goals. Group work is based on the knowledge of people's needs for each other and their interdependence. Groupwork is a method of reducing and for accomplishing socially desirable purposes

Metode groupwork merupakan metode yang berorientasi penyembuhan yang didesain untuk memperbaiki atau menyembuhkan suatu disfungsi sosial. Tujuan dari metode group work dengan perspektif ini adalah membantu seseorang untuk belajar berbuat sesuatu yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengatasi masalah yang dihadapi.

c. Metode Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

Metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat merupakan model intervensi yang diarahkan pada upaya merubah masyarakat di tingkatan yang lebih luas. Menurut Brokensha dan Hodge dalam adi (2015) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai:

A movement design to promote better living for the whole community with the active participation, and, if possible, on the initiative of the community. It includes the whole range of development activities in the district whether these are undertaken by goverment or unofficial bodies. Community development must make use of the cooperative movement and must be put into effect in the closest association with local goverment bodies.

Definisi di atas menyatakan bahwa pengembangan masyarakat sebagai suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan, berdasarkan inisiatif masyarakat. Pengembangan masyarakat harus dilakukan melalui gerakan yang kooperatif dan harus berhubungan dengan bentuk pemerintahan lokal terdekat. Metode-metode diatas merupakan metode inti dalam pekerja sosial dan terdapat metode bantu yaitu aksi sosial, penelitian sosial dan pelayanan sosial.

2.3 Usaha Kesejahteraan Sosial

2.3.1 Pengertian Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu program-program dan kegiatan yang berpusat pada tujuan kesejahteraan sosial yang meliputi semua upaya, program, dan kegiatan yang

bertujuan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Usaha kesejahteraan sosial merupakan sebuah rutinitas upaya pengembangan sumber-sumber daya dalam menumbuhkan, membina, dan meningkatkan terwujudnya kesejahteraan sosial serta menunjang usaha-usaha lain yang mempunyai tujuan yang sama. Menurut Cassidy yang dikutip (Fahrudin, 2014) mengatakan:

“Sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber- sumber manusia, dan kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalisasi, kesehatan mental, kesehatan masyarakat, pendidikan, rekreasi, perlindungan buruh dan perumahan.”

Menurut pengertian di atas usaha kesejahteraan sosial merupakan kegiatan- kegiatan terorganisasi dan merupakan kegiatan yang kongkrit untuk menjawab masalah- masalah kebutuhan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, usaha kesejahteraan sosial itu sendiri dapat ditunjukkan pada individu, kelompok, dan masyarakat.

2.3.2 Tujuan Usaha Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang diharapkan oleh masyarakat apabila usaha kesejahteraan sosial bisa berjalan dengan baik oleh pihak pemerintah, organisasi non pemerintah, maupun dunia usaha. Karena usaha kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh organisasi yang menyediakan usaha kesejahteraan tersebut. Menurut Mendoza yang dikutip (Fahrudin, 2014) menyatakan tiga tujuan dari usaha kesejahteraan sosial yaitu:

2.3 Tujuan Kemanusiaan dan Keadilan Sosial (Humanitarian and Social Justice Goal).

Tujuan ini, bersumber dari gagasan ideal demokratis tentang keadilan sosial, dan hal ini berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk mengembangkan

pontensi diri yang mereka miliki. Meskipun kadangkala potensi tersebut tertutup oleh adanya hambatan fisik, sosial, ekonomi, kejiwaan ataupun berbagai faktor lainnya. Berdasarkan tujuan ini, usaha kesejahteraan sosial banyak dilahirkan pada upaya pengidentifikasian kelompok yang paling tidak mendapat perhatian; kelompok yang paling dilerantarkan; kelompok yang paling tergantung terhadap pihak lain ataupun kelompok yang kurang diuntungkan. Usaha kesejahteraan sosial menjadikan mereka sebagai kelompok sasaran dalam upaya menjembatani kelangkaan sumber daya kelompok sasaran miliki.

2.4 Tujuan yang terkait dengan Pengendalian Sosial (Social Control Goal)

Tujuan ini berkembang berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang tidak diuntungkan; kekurangan; ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya, akan melakukan “serangan” ataupun menjadi “ancaman” bagi kelompok masyarakat yang sudah mapan. Karena itu, kelompok masyarakat yang sudah mapan berupaya “mengamankan” diri mereka dari sesuatu yang dapat mengancam kehidupan, pemikiran maupun stabilitas yang sudah berjalan, misalnya saja perusahaan multi nasional yang mengalokasikan sebagian kecil dari anggarannya untuk memberikan bantuan keuangan pada masyarakat sekitar lokasi, agar mereka tidak melakukan perusakan pada property yang dimiliki perusahaan ataupun melakukan pembelokiran jalan ke arah lahan pertambangan.

2.5 Tujuan yang terkait dengan Pembangunan Ekonomi (Ekonomi Development Goal)

Tujuan pembangunan ekonomi memprioritaskan pada program-program yang dirancang untuk meningkatkan produktifitas barang dan jasa, serta berbagai sumber daya yang dapat menunjang serta memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi.

Beberapa contohnya usaha kesejahteraan sosial yang searah dengan tujuan pembangunan ekonomi adalah:

1. Beberapa tipe usaha kesejahteraan sosial yang secara langsung memberikan sumbangan terhadap peningkatan produktifitas individu, kelompok ataupun masyarakat. Seperti usaha kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan konseling pada pekerja di sektor industri, usaha kesejahteraan sosial yang memfokuskan pada pelatihan bagi mereka yang masih atau sedang mengagur, dan sebagainya.
2. Usaha kesejahteraan sosial yang berupaya untuk mencegah dan meminimalisir hambatan “beban” akibat adanya “tanggungan” dari pada pekerja dewasa. “tanggungan” (dependent) di sini bisa saja anggota keluarga yang mengalami kecacatan, dan sebagainya. Usaha kesejahteraan sosial yang dikembangkan dalam kaitan dengan hal ini bisa saja berupa, tempat penitipan anak; panti werdha, pusat rehabilitasi, dan sebagainya.
3. Usaha kesejahteraan sosial yang mencegah atau “melawan” pengaruh buruk dari urbanisasi dan industrilisasi terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat, serta membantu mengidentifikasi dan mengembangkan kepemimpinan, lokal dan komunitas. Misalnya, program latihan kepemimpinan, program pendidikan kehidupan berkeluarga dan sebagainya.

2.4 Pemberdayaan

2.4.1 Pengertian Pemberdayaan

Menurut Edi Suharto (2005:56) Pemberdayaan masyarakat adalah aktivitas yang dilakukan untuk memperkuat kekuasaan kelompok lemah dalam masyarakat dengan memberikan motivasi,

dorongan, dan memberikan kesadaran mengenai potensi yang dimiliki dan mengupayakan potensi menjadi tindakan yang nyata. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah pendekatan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam sebuah paradigma baru yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan struktur dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Desa wisata merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat khususnya petani. Bentuk dari desa wisata adalah pengembangan desa yang dijadikan sebagai objek wisata (Mustangin, 2017, hlm. 64). Melalui desa wisata, masyarakat akan diuntungkan melalui banyaknya wisatawan yang mengunjungi dan berbelanja di tempat itu sehingga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 yaitu pengembangan wisata berbasis pedesaan (Desa Wisata) akan menggerakkan aktifitas ekonomi pariwisata yang akan mencegah urbanisasi masyarakat desa ke kota. Menurut Hadiwijoyo (2012, hlm. 35-36) pemberdayaan masyarakat perlu langkah – langkah riil dalam penanganannya. Langkah – langkah yang diambil dalam memujudkan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Membentuk iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang, dengan:
 - a. Menyadarkan masyarakat dan memberikan dorongan motivasi untuk berkembang.
 - b. Melibatkan masyarakat untuk menggambarkan dan merencanakan wilayahnya.

2. Memperkuat potensi yang ada dengan memperkuat masyarakat dalam komunitas pembangunan. 3. Pendampingan kelompok bawah dan menengah melalui:

- a. Penguatan akses/ aksesibility empowerment dengan menciptakan akses dari kelompok informal kepada kelompok formal.
- b. Penguatan teknis/ technical empowerment untuk peningkatan kapasitas kelompok yang diberdayakan.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata "power" (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang atau jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2014 : 57-58).

Rappaport menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai dan berkuasa atas kehidupannya (Anwas, 2014: 49). Parsons menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-

kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (Mardikanto, 2013: 29.) Sedangkan menurut Ife pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri, berpartisipasi didalamnya dan mempengaruhi kehidupan di masyarakatnya (Zubaedi, 2013: 75).

Berdasarkan pengertian diatas pada hakikatnya pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan kehidupan masyarakat dengan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki. Hal ini berdasarkan pada kemampuan masyarakat menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan.

2.4.3 Tahapan Pemberdayaan

Pergeseran aliran pembangunan dari pembangunan yang bertumpu pada kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik menuju pembangunan yang menekankan pada legitimasi kekuatan rakyat, yang bertumpu pada manusia dan kemanusiaan yang menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat secara partisipatif (*participatory community empowerment*) merupakan pilihan strategi pembangunan yang digunakan negara-negara yang ingin keluar dari situasi krisis (ESCAP, 1999 dalam Hikmat, 2004). Sistem dan kekuatan ekonomi tidak lagi menjadi tumpuan pembangunan masyarakat. Dengan perkataan lain, pemberdayaan tidak hanya seputar persoalan ekonomi, namun juga persoalan sosial dan politik. Strategi pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Pendekatan ini menyadari betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal yang ditempuh melalui kesanggupan melakukan kontrol internal atas sumber daya materi dan nonmaterial yang penting melalui retribusi modal dan kepemilikan. Kendati demikian, model pembangunan yang berpusat kepada rakyat lebih menekankan pada

pemberdayaan (Empowerment). Model ini memandang inisiatif kreatif rakyat sebagai sumberdaya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material spiritual rakyat sebagai tujuan yang harus dicapai oleh proses pembangunan (Hikmat, 2004).

Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Adapun tahapan pemberdayaan menurut Ambar Teguh Sulistyani yang dikutip oleh Aziz Muslim dalam buku yang berjudul Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, bahwa tahap-tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan diantaranya adalah:

- 1) Pertama, tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam tahapan ini pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar dapat sejahtera. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran akan tentang kondisinya saat itu, dan demikian akan dapat merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sehingga dengan adanya penyadaran ini dapat mengunggah pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah perilaku.
- 2) Kedua, tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan, dalam hal ini perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan adanya pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang menjadi nilai tambahan dari potensi yang dimiliki. Sehingga pada nantinya pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
- 3) Ketiga, tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan. Dalam tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan ketrampilan ini sasaran pemberdayaan diarahkan

untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan ketrampilan yang pada nantinya akan mengarahkan pada kemandirian.

Secara keseluruhan bahwa menurut Ambar Teguh Sulistyani menyatakan tahapan pemberdayaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu kesadaran, transformasi pengetahuan dan kecakapan, sedangkan yang paling akhir adalah tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan. Sedangkan menurut (Adi, 2015) bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, yaitu petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.
2. Tahap assesment, tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Tahap formulasi rencana aksi, pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditujukan kepada penyalang dana.

5. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan adanya peran dari masyarakat, dan fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa melenceng saat di lapangan.
6. Tahap evaluasi, pada tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator.
7. Tahap terminasi, tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi sebaiknya dilakukan jika masyarakat sudah bisa mandiri, bahkan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya.

2.5 Masyarakat

2.5.1 Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi. Negara modern misalnya, merupakan kesatuan manusia dengan berbagai macam prasarana, yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi secara intensif, dan dengan frekuensi yang tinggi. Suatu negara modern mempunyai suatu jaringan komunikasi berupa jaringan jalan raya, jaringan jalan kereta api, jaringan perhubungan udara, jaringan telekomunikasi, sistem radio dan televisi, berbagai macam surat kabar di tingkat nasional, suatu sistem upacara pada hari-hari raya nasional dan sebagainya. Negara dengan wilayah geografis yang lebih kecil berpotensi untuk berinteraksi secara intensif daripada negara

dengan wilayah geografis yang sangat luas. Tambahan pula bila negara tersebut berupa kepulauan, seperti halnya negara kita.

Adanya prasarana untuk berinteraksi menyebabkan warga dari suatu kelompok manusia itu saling berinteraksi. Sebaliknya, bila hanya adanya suatu potensi untuk berinteraksi saja belum berarti bahwa warga dari suatu kesatuan manusia itu benar-benar akan berinteraksi. Suatu suku bangsa, misalnya saja suku bangsa Bali, mempunyai potensi untuk berinteraksi, yaitu bahasa Bali. Namun, adanya potensi itu saja tidak akan menyebabkan bahwa semua orang Bali tanpa alasan mengembangkan aktivitas yang menyebabkan suatu interaksi secara intensif di antara semua orang Bali tadi.

Hendaknya diperhatikan bahwa tidak semua kesatuan manusia yang bergaul atau berinteraksi itu merupakan masyarakat, karena suatu masyarakat harus mempunyai suatu ikatan lain yang khusus. Sekumpulan orang yang mengerumuni seorang tukang penjual jamu di pinggir jalan tidak dapat disebut sebagai suatu masyarakat. Meskipun kadang-kadang mereka juga berinteraksi secara terbatas, mereka tidak mempunyai suatu ikatan lain kecuali ikatan berupa perhatian terhadap penjual jamu tadi. Demikian juga sekumpulan manusia yang menonton suatu pertandingan sepak bola, dan sebenarnya semua kumpulan manusia penonton apapun juga, tidak disebut masyarakat. Sebaliknya, untuk sekumpulan manusia itu kita pakai istilah *kerumunan*. Dalam bahasa Inggris telah dipakai istilah *crowd*.

Ikatan yang membuat suatu kesatuan manusia menjadi suatu *masyarakat* adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu. Lagipula, pola itu harus bersifat mantap dan kontinu, dengan perkataan lain, pola khas itu harus sudah menjadi adat istiadat yang khas. Dengan demikian, suatu asrama pelajar, suatu akademi kedinasan, atau

suatu sekolah, tidak dapat kita sebut masyarakat, karena meskipun kesatuan manusia yang terdiri dari murid, guru, pegawai administrasi, serta para karyawan lain itu terikat dan diatur tingkah lakunya oleh berbagai norma dan aturan sekolah dan lain-lain, tetapi sistem normanya hanya meliputi beberapa sektor kehidupan yang terbatas saja. Sedangkan sebagai kesatuan manusia, suatu asrama atau sekolah itu hanya bersifat sementara, artinya tidak ada kontinuitasnya.

Selain ikatan adat istiadat khas yang meliputi sektor kehidupan dan kontinuitas waktu, warga suatu masyarakat harus juga mempunyai ciri lain, yaitu suatu rasa identitas bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan manusia lainnya. Ciri ini memang dimiliki oleh penghuni suatu asrama atau anggota suatu sekolah. Akan tetapi, tidak adanya sistem norma yang menyeluruh dan tidak adanya kontinuitas, menyebabkan penghuni suatu asrama atau murid suatu sekolah tidak bisa disebut masyarakat. Sebaliknya suatu negara, suatu kota, atau desa, misalnya, merupakan suatu kesatuan manusia yang memiliki keempat ciri terurai di atas, yaitu (1) interaksi antar warga-warganya, (2) adat istiadat, norma, hukum dan aturan-aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah laku warga negara kota atau desa; (3) kontinuitas waktu; (4) dan rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Itulah sebabnya suatu negara atau desa dapat kita sebut masyarakat dan kita memang sering berbicara tentang masyarakat Indonesia, masyarakat Filipina, masyarakat Medan, masyarakat Sala, masyarakat Balige, masyarakat Ciamis, atau masyarakat desa Trunyan.

Setelah uraian tadi, sekarang tiba waktunya untuk merumuskan suatu definisi mengenai konsep masyarakat untuk keperluan analisis antropologi. Dengan memperhatikan ketiga ciri terurai sebelumnya, definisi mengenai masyarakat secara khusus dapat kita rumuskan sebagai

berikut: *Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.*

Definisi itu mempunyai suatu definisi yang diajukan oleh J.L. Gillin dan J.P. Gillin dalam buku mereka *Cultur Sociology* (1954: hlm.139), yang merumuskan bahwa masyarakat tau *society* adalah “..... *the largest grouping in which common customs, traditions, attitudes and feelings of unity are operative*”. Unsur *grouping* dalam definisi kita, unsur *common customs* dan *traditions* adalah unsur “adat istiadat” dan “kontinuitas” dalam definisi kita, serta unsur *common attitudes and feelings of unity* sama dengan unsur “identitas bersama”. Suatu tambahan dalam definisi Gillin adalah unsur (*the largest*) “*terbesar*” yang memang tidak dimuat dalam definisi kita. Walaupun demikian, konsep itu dapat diterapkan pada konsep masyarakat suatu bangsa atau negara, misalnya konsep masyarakat Indonesia, masyarakat Filipina, masyarakat Belanda, masyarakat Amerika, dalam contoh kita sebelumnya.

Meskipun kita sering berbicara tentang konsep masyarakat dalam arti luas, seperti konsep masyarakat negara Indonesia, tetapi kenyataannya, dalam pikiran kita tidak terbayang seluruh manusia yang berjumlah ⁺ 230 juta jiwa Indonesia itu. Biasanya yang terbayang dalam pikiran kita ialah lingkaran manusia Indonesia sekitar diri kita sendiri, manusia Indonesia di suatu lokasi tertentu, atau dalam ikatan suatu kelompok tertentu. Dalam bukunya, *Azas-azas Sosiologi* guru besar ilmu sosiologi Universitas Gadjah Mada, M.M. Djodjodigono, membedakan antara konsep “masyarakat dalam arti yang luas dan sempit”.

Berdasarkan konsep Djodjodigono ini dapat dikatakan masyarakat Indonesia sebagai contoh suatu “masyarakat dalam arti luas”. Sebaliknya, masyarakat yang terdiri dari warga suatu

kelompok kekerabatan seperti *dadia*, *marga*, dan *suku*, kita anggap sebagai contoh dari suatu “masyarakat dalam arti sempit”.

Kesatuan wilayah, keatuan adat-istiadat, rasa identitas komunitas dan rasa royalitas terhadap komunitas sendiri, merupakan ciri-ciri suatu komunitas, dan pangkal dari perasaan seperti patriotism, nasionalisme dan sebagainya, yang biasanya bersangkutan dengan negara. Memang, suatu negara merupakan wujud dari suatu komunitas yang paling besar. Selain negara, keatuan-kesatuan seperti kota, desa, suatu RW atau RT, juga sesuai dengan definisi kita mengenai komunitas, yaitu: *suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata, dan berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas komunitas.*

Uraian sebelumnya, kesatuan hidup manusia di suatu negara, desa atau kota, juga kita sebut “masyarakat”. Apakah dengan demikian konsep masyarakat sama dengan konsep komunitas? Kedua istilah itu memang bertumpang-tindih, tetapi istilah masyarakat adalah istilah umum bagi suatu keatuan hidup manusia, dan karena itulah bersifat luas daripada istilah komunitas. Masyarakat adalah semua kesatuan hidup manusia yang bersifat mantap dan terikat oleh satuan adat-istiadat dan rasa identitas bersama, tetapi komunitas bersifat khusus karena ciri tambahan ikatan lokasi dan kesadaran wilayah tadi.

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan

hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Suroto, 2015)

2.5.2 Ciri-ciri Masyarakat

a. Masyarakat Modern

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sudah tidak terikat pada adat-istiadat. Adat-istiadat yang menghambat kemajuan segera ditinggalkan untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang secara rasional diyakini membawa kemajuan, sehingga mudah menerima ide-ide baru (Dannerius Sinaga, 1988: 156). Berdasar pada pandangan hukum, Amiruddin (2010: 205), menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern mempunyai solidaritas sosial organis. Menurut OK. Chairuddin (1993: 116), solidaritas organis didasarkan atas spesialisasi. Solidaritas ini muncul karena rasa saling ketergantungan secara fungsional antara yang satu dengan yang lain dalam satu kelompok masyarakat. Spesialisasi dan perbedaan fungsional yang seperti diungkapkan tersebut memang kerap dijumpai pada masyarakat modern.

b. Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat-istiadat yang telah turuntemurun. Keterikatan tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal baru yang menuntut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat tradisional kurang kritis (Dannerius Sinaga, 1988: 152). Menurut Rentelu, Pollis dan Shcaw yang dikutip dalam (P. J Bouman. 1980: 53) masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang statis tidak ada perubahan dan dinamika yang timbul dalam kehidupan.

Menurut P. J Bouman (1980: 54-58) hal yang membedakan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan alam sekitarnya. Faktor ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam. Oleh karena itu masyarakat tradisional mempunyai karakteristik tertentu yang menjadi ciri pembeda dari masyarakat modern. Adapun karakteristik pada masyarakat tradisional diantaranya:

- a) Orientasi terhadap nilai kepercayaan kebiasaan dan hukum alam tercermin dalam pola berpikirnya
 - b) Kegiatan ekonomi masyarakat bertumpu pada sektor agraris
 - c) Fasilitas pendidikan dan tingkat pendidikan rendah
 - d) Cenderung tergolong dalam masyarakat agraris dan pada kehidupannya tergantung pada alam sekitar
 - e) Ikatan kekeluargaan dan solidaritas masih kuat
 - f) Pola hubungan sosial berdasar kekeluargaan, akrab dan saling mengenal
 - g) Kepadatan penduduk rata-rata perkilo meter masih kecil
 - h) Pemimpin cenderung ditentukan oleh kualitas pribadi individu dan faktor keturunan
- (Dannerius Sinaga, 1988: 156).

Menurut Marion Levy bahwa ada empat kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah kelompok dapat disebut sebagai masyarakat, yaitu

1. Kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seorang anggotanya.
2. Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran.
3. Adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada.

4. Kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto unsur-unsur pembentuk masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Beranggotakan dua orang atau lebih.
2. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.
3. Berhubungan dengan jangka waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang berkomunikasi, dan membuat aturan-aturan yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat.
4. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan antar anggota masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, ciri-ciri masyarakat yaitu:

1. Hidup secara berkelompok.
2. Melahirkan kebudayaan.
3. Mengalami perubahan.
4. Adanya interaksi.
5. Adanya seorang pemimpin.
6. Memiliki stratifikasi sosial.

2.5.3 Fungsi Masyarakat

Masyarakat merupakan bagian dari pranata sosial sebagai wahan berinteraksi dan ikut mengatur dan mengarahkan tindakan-tindakan individu/kelompok dengan pola- pola yang telah disepakati. Jiwa masyarakat merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat,

meliputi pranata, status, dan peranan sosial. Pranata merupakan sistem norma khusus yang menata rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi keperluan khusus manusia. Status atau kedudukan sosial dapat netral, tinggi, menengah, rendah hubungannya terkait dengan pola tindak interaksi yang dikonsepsikan oleh norma yang menata seluruh tindakan tadi. Peranan sosial adalah tindakan atau tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu, bersifat khas, tertentu dalam berhadapan dengan individu-individu dalam kedudukan lain. (Eny, 2020)

2.5.4 Pengembangan Masyarakat

Sebagaimana asal katanya, yakni pengembangan masyarakat, PM terdiri dari dua konsep, yaitu “pengembangan” dan “masyarakat”. Secara singkat, pengembangan atau pembangunan merupakan usaha Bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya. Sementara itu, masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu (Mayo, 1998:162) dalam buku (Edi Suharto, 2017) :

- Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.
- Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

2.6 Pembangunan

2.6.1 Pengertian Pembangunan

Pembangunan yang ideal dan berkelanjutan jika didasarkan pada basis kekuatan dan kemampuan rakyat. Tanpa basis kekuatan dan kemampuan rakyat, mustahil hasil pembangunan berefek jangka panjang. Menurut Noor Isran (2013:26)” kurangnya dukungan kekuatan dan kemampuan rakyat dalam proses pembangunan, maka pembangunan akan terjebak dalam kegagalan (failed trap)”. Dalam konteks ini perlu diformulasikan apa sesungguhnya makna pembangunan. Jika mencoba memformulasikan, pembangunan dapat diartikan suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasi yang manusiawi, bermartabat, dan mandiri.

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya.

2.6.2 Konsepsi pembangunan masyarakat

Menurut Korten (Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013:51-52) menyatakan konsep pembangunan berpusat pada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Selanjutnya Korten

mengemukakan tiga tema penting yang dianggap menentukan bagi konsep perencanaan yang berpusat pada rakyat, yaitu:

- 1) Penekanan akan dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
- 2) Kesadaran bahwa walaupun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagai besar rumah tangga miskin
- 3) Kebutuhan akan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal.

Menurut Nasikun (Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013: 80) paradigma pembangunan yang baru berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan pertama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat didalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya, termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastruktur. Dengan semua itu jaminan bahwa distribusi keuntungan dan mamfaat yang lebih adil bagi masyarakat dari operasinya akan dapat diletakkan dengan lebih kokoh.

Aspek penting dalam suatu program pembangunan pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan serta berkelanjutan. Komitmen pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk dukungan dana dan

sumberdaya pendukung lainnya dalam proses fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat bagaimanapun tetap penting.

2.7 Desa Wisata

2.7.1 Pengertian Desa Wisata

Perencanaan dalam sebuah wisata sangatlah penting, dikarenakan perencanaan digunakan sebagai pedoman penyelenggara wisata, sebagai sarana untuk memprediksikan kemungkinan timbulnya hal-hal di luar dugaan sekaligus alternatif untuk memecahkannya, sebagai sarana untuk mengarahkan penyelenggaraan wisata sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan wisata secara efektif dan efisien, dan sebagai alat ukur tingkat keberhasilan wisata sebagai upaya pengawasan atau evaluasi dalam rangka memberikan umpan balik bagi penyelenggaraan wisata selanjutnya.

Program desa wisata sebagai salah satu program yang untuk pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat untuk dapat hidup dengan baik melalui pemanfaatan potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu desa, termasuk Desa Pangalengan. Pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kawasan yang baik guna melindungi kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi, seperti misalnya ancaman hilangnya sumber-sumber potensi budaya yang ada di masyarakat. Menurut Nuryanti (dalam Nalayani, 2016) desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Desa wisata merupakan suatu bentuk perkembangan pariwisata yang menitik beratkan pada kontribusi masyarakat sekitar pedesaan dan pelestarian lingkungan area pedesaan. Desa wisata memiliki produk wisata yang bernilai budaya dan memiliki karakteristik tradisional yang kuat

(Fandeli, Baiquni, Dewi, 2013) Begitupun menurut Inskeep (2013) mendefinisikan wisata pedesaan yang dimana sekelompok wisatawan tinggal dalam suasana yang tradisional, tinggal di desa untuk mempelajari kehidupan di pedesaan.

Menurut Peraturan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, desa wisata adalah suatu bentuk kesatuan antara akomodasi, atraksi, sarana dan prasarana pendukung wisata yang disajikan dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi yang berlaku.

Desa Wisata adalah sebuah area atau daerah pedesaan yang memiliki daya tarik khusus yang dapat menjadi daerah tujuan wisata. Di desa wisata, penduduk masih memegang tradisi dan budaya yang masih asli. Serta beberapa aktivitas pendukung seperti sistem bertani, berkebun serta makanan tradisional juga berkontribusi mewarnai keberadaan desa wisata itu sendiri. Selain faktor tersebut, faktor lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan faktor penting yang harus ada di suatu desa wisata (Zakaria, 2014).

Saat ini sektor pariwisata di Indonesia menjadi salah satu sektor yang diminati dan memberikan harapan yang cukup menjanjikan dari segi ekonomi. Setiap daerah seolah berlomba dalam mengelola pariwisatanya. Masing-masing daerah mencoba menggali seluruh potensi yang dimiliki yang bisa “dijual” dan menjadi lahan bisnis yang menjanjikan. Sektor pariwisata juga membuka peluang kerja, peluang bagi produk lokal untuk masuk ke jenjang internasional yang akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Perkembangan kepariwisataan juga menghampiri desa. Hampir setiap desa di Indonesia memiliki potensi pariwisata yang bisa dikembangkan mulai dari kebudayaannya sampai wisata alam yang bisa dijadikan sebuah konsep bisnis yang menjanjikan. Saat ini wisatawan lebih memilih wisata yang bernuansa alam pedesaan yang masih alami dan asri. Dengan melakukan perjalanan wisata ke desa, wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat desa dan

dapat melihat langsung aktivitas sosial budaya masyarakat lokal. Hal ini menyebabkan pariwisata di pedesaan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kejenuhan terhadap wisata yang bernuansa modern menjadi alasan utama wisatawan memilih berwisata ke desa. Dari sinilah muncul istilah desa wisata. Desa wisata merupakan sebuah kawasan pedesaan yang memiliki keunikan dan karakteristik khusus untuk menjadi destinasi wisata, antara lain: lingkungan bernuansa alami, tradisi dan budaya masih dipegang masyarakat, makanan khas, sistem pertanian dan sistem kekerabatan (<http://www.ampta.ac.id/desa-wisata>).

Pengembangan pariwisata pedesaan didukung oleh tiga faktor. Pertama, wilayah pedesaan memiliki potensi alam dan budaya yang relatif lebih otentik dari pada wilayah perkotaan, masyarakat desa masih menjalankan tradisi dan ritual-ritual budaya dan topografi yang cukup serasi. Kedua, wilayah pedesaan memiliki lingkungan fisik yang relatif masih asli atau belum banyak tercemar oleh banyal ragam jenis polusi dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Ketiga, dalam tingkat tertentu daerah pedesaan menghadapi perkembangan ekonomi yang relatif lambat, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal secara optimal merupakan alasan rasional pengembangan pariwisata pedesaan (Damanik dalam Anak Agung Istri Andriyani (2017 : 2)

2.7.2 Komponen-Komponen Desa Wisata

Dalam pengembangan desa wisata yang menjadi salah satu faktor pentingnya adalah keaslian dari desa setempat serta integrasi dari komponen pariwisata yang ada. Komponen untuk pengembangan desa wisata ini tidak jauh berbeda dengan komponen pariwisata. Pariwisata Perdesaan adalah suatu wilayah perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat keseharian, arsitektur bangunan maupun struktur tata ruang desa yang khas atau kegiatan

perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan yaitu, atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukungnya (Putra,2006). Menurut Gumelar (2010) tidak semua kegiatan pariwisata yang dilaksanakan di desa adalah benar-benar bersifat desa wisata, oleh karena itu agar dapat menjadi pusat perhatian pengunjung, desa tersebut pada hakikatnya harus memiliki hal yang penting, antara lain:

1. Keunikan, keaslian, sifat khas
2. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa
3. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung
4. Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.

Selain itu, menurut Putra (2006) Desa Wisata adalah pengembangan suatu wilayah (desa) dengan memanfaatkan unsur–unsur yang ada dalam masyarakat desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata, menjadi suatu rangkaian aktivitas pariwisata yang terpadu dan memiliki tema. Di dalam desa tersebut juga mampu menyediakan dan memenuhi serangkaian kebutuhan suatu perjalanan wisata, baik dari aspek daya tarik maupun berbagai fasilitas pendukungnya.

Adapun unsur–unsur dari Desa Wisata adalah :

1. Memiliki potensi pariwisata, seni, dan budaya khas daerah setempat.
2. Lokasi desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan wisata yang sudah dijual.
3. Diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih, dan pelaku–pelaku pariwisata, seni dan budaya.
4. Aksesibilitas dan infrastruktur mendukung program Desa Wisata.

5. Terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan.

2.7.3 Faktor Pendukung Desa Wisata

Suatu desa dapat dikatakan sebagai desa wisata apabila memunihi beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Faktor kelangkaan

Faktor ini meliputi sifat dari atraksi wisata yang tidak bisa dijumpai atau langka ditempat lain

- 2) Faktor alamiah

Faktor ini meliputi sifat atraksi wisata yang belum pernah mengalami perubahan akibat campur tangan manusia.

- 3) Faktor keunikan

Faktor ini meliputi sifat atraksi wisata yang memiliki keunggulan komperatif di banding obyek wisata lainnya.

- 4) Faktor pemberdayaan

Faktor ini meliputi pemberdayaan yang mampu menghimbau masyarakat agar ikut serta dan diberdayakan dalam pengelolaan obyek wisata di daerahnya.

2.7.4 Tujuan Pembangunan Desa Wisata

Tujuan dari pembentukan desa wisata, yaitu untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan. Selain itu, dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah.

Adapun untuk membangun dan menumbuhkan sikap serta dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan

berkembangnya kepariwisataan di suatu daerah. Adapun manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat dan memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.

2.7.5 Fungsi Desa Wisata

Fungsi desa wisata sebagai wadah langsung bagi masyarakat akan kesadaran adanya potensi wisata dan terciptanya Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata. Hal tersebut sebagai unsur kemitran baik bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan kepariwisataan di daerah.

Sedangkan adanya pembangunan desa wisata akan memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

1. Bidang ekonomi: meningkatkan perekonomian nasional, regional dan masyarakat lokal.
2. Bidang sosial: membuka lapangan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat desa.
3. Bidang politik, internasional: menjembatani perdamaian antar bangsa didunia, sedangkan untuk nasional: dapat memperkokoh persatuan bangsa, mengatasi disintegrasi.
4. Bidang pendidikan: memperluas wawasan dan cara cara berpikir orang-orang desa, mendidik cara hidup bersih dan sehat.
5. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek): meningkatkan ilmu dan teknologi di bidang kepariwisataan.
6. Bidang sosial dan budaya: menggali dan mengembangkan kesenian serta kebudayaan asli daerah yang hampir punah untuk dilestarikan kembali.
7. Bidang lingkungan: menggugah sadar lingkungan, yaitu menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya memelihara dan melestarikan lingkungan bagi kehidupan manusia kini dan masa yang akan datang.

2.7.6 Syarat dan Tipe Desa Wisata

Suatu desa dapat dikatakan sebagai desa wisata jika desa tersebut dapat memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Aksesibilitas yang baik, sehingga mudah di kunjungi oleh wisatawan dengan menggunakan berbagai sarana transportasi
2. Memiliki obyek-obyek yang menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan khas, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai atraksi wisata
3. Masyarakat dan aparat desa menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata dan para wisatawan yang datang ke desa
4. Keamanan di desa tersebut terjamin
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi dan tenaga kerja yang memadai
6. Beriklim sejuk dan dingin
7. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat.

Menurut pola, proses, dan tipe pengelola desa atau kampung wisata di Indonesia terbagi dalam dua bentuk, yaitu tipe terstruktur dan tipe terbuka. Berikut ini penjelasannya:

1). Tipe terstruktur

Tipe terstruktur ditandai dengan karakter- karakter sebagai berikut:

- a) Lahan terbatas yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk kawasan tersebut. Tipe ini mempunyai kelebihan dalam citra yang ditumbuhkannya, sehingga mampu menembus pasar internasional.
- b) Lokasi pada umumnya terpisah dari masyarakat atau penduduk lokal, sehingga dampak negatif yang ditimbulkannya diharapkan terkontrol. Selain itu, pencemaran sosial budaya yang ditimbulkan akan terdeteksi sejak dini.

- c) Lahan tidak terlalu besar dan masih dalam tingkat kemampuan perencanaan yang integratif dan terkoordinasi.

2). Tipe terbuka

Tipe ini ditandai dengan karakter-karakter yaitu tumbuh dan menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola dengan masyarakat lokal. Distribusi pendapatan yang didapat dari wisatawan dapat langsung dinikmati oleh penduduk lokal. Akan tetapi dampak negatifnya cepat menjalar menjadi satu ke dalam penduduk lokal, sehingga sulit dikendalikan.

2.7.7 Langkah-langkah Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Desa Wisata

Untuk mencapai desa wisata yang baik, sangat diperlukan masyarakat yang sadar akan potensi daerahnya pula. Peran pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mampu untuk mandiri dan menumbuhkan kreatifitas. Beberapa langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, diantaranya:

1) Penyuluhan

Dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang desa wisata perlu dengan memberikan penyuluhan tentang bagaimana mengelola desa wisat, pemanfaatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi serta mengelola lingkungan hidupnya. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Sebelum membina, penyuluh lapangan disini perlu melakukan pendekatan dengan memahami kemampuan kelompok maupun perorangan agar materi yang disampaikan kepada warga desa dapat dicerna dengan baik. Dalam hal ini, peran seorang penyuluh dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat memiliki tiga perab yaitu;

- Berperan sebagai pendidik, memberikan pengetahuan atau cara-cara baru dalam mengelola desa wisata
- Berperan sebagai pemimpin, yang dapat membimbing dan memotivasi masyarakat agar mau mengubah cara berpikirnya, dan agar lebih terbuka lagi.
- Berperan sebagai penasihat, yang dapat melayani, memberikan petunjuk dan membantu masyarakat dalam mengelola desa wisata.

2) Pelatihan

Setelah melakukan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang desa wisata, maka tahap selanjutnya adalah dengan melakukan pelatihan. Pelatihan didefinisikan sebagai berbagai usaha pengenalan untuk mengembangkan kinerja tenaga kerja pada pekerjaan yang dilakukan. Hal ini biasanya berarti melakukan perubahan perilaku, sikap, keahlian, dan pengetahuan khusus yang lebih spesifik. Agar pelatihan menjadi lebih efektif maka didalam pelatihan harus mencakup suatu pembelajaran atas pengalaman-pengalaman, pelatihan harus menjadi kegiatan keorganisasian yang direncanakan dan dirancang didalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi. Ini berarti bahwa pelatihan adalah suatu pengalaman pembelajaran didalam mencari perubahan permanen secara relatif pada suatu individu yang akan memperbaiki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya. Beberapa manfaat dengan diadakannya pelatihan di antaranya adalah;

1. Meningkatkan pengetahuan atas budaya dan para pesaing luar.
2. Membantu para warga yang mempunyai keahlian untuk bekerja dengan teknologi baru.
3. Membantu para warga untuk memahami bagaimana bekerja secara efektif dalam tim untuk menghasilkan jasa dan produk yang berkualitas.
4. Memastikan warga menekankan pada inovasi, kreativitas dan pembelajaran.

2.7.8 Dampak Positif dan Negatif Adanya Desa Wisata

• Dampak Positif

- 1) Adanya keuntungan secara ekonomi melalui transaksi yang terjadi
- 2) Dampak positif ekonomi pengembangan desa wisata selanjutnya adalah meningkatnya penjualan produk lokal sehingga meningkatkan perekonomian warga desa. Salah satunya yang nyata dari dampak positif ekonomi pengembangan desa wisata adalah desa wisata yang dimanfaatkan sebagai salah satu cara promosi produk-produk lokal yang ada didalam desa. Manfaat promosi ini juga akan meningkatkan status desa sebagai desa wisata akan memberikan manfaat timbal balik.
- 3) Berpotensi memunculkan adanya ide usaha baru di sekitar kawasan
- 4) Sebuah desa akan bisa berkembang dengan pesat ketika semua elemen masyarakatnya terutama para generasi mudanya mampu berpikir kreatif untuk membuat inovasi dan karya-karya yang menarik, berbagai potensi yang ada di desa sebenarnya sangat memungkinkan untuk bisa dikembangkan dan bisa diwujudkan kegiatan berbasis usaha ekonomi masyarakat manakala dikemas dengan cara yang kreatif dan inovatif. Begitupun juga dengan potensi keindahan yang dimiliki alam di pedesaan. Jika dikemas secara kreatif dan inovatif maka besar peluangnya akan menjadi lahan uang bagi masyarakat desa tersebut.
- 5) Secara tidak langsung menciptakan lingkungan yang rapih dan bersih.
- 6) Selanjutnya untuk dampak positif ekonomi pengembangan desa wisata yang dapat dirasakan atau bahkan diutamakan adalah meningkatnya pembangunan infrastruktur desa. Hal ini dirasa penting baik bagi sebuah desa wisata agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengunjung ataupun bagi masyarakat desa. Peningkatan pembangunan

infrastruktur desa sebagai dampak positif ekonomi pengembangan desa wisata, selain untuk kepentingan wisata juga baik adanya apabila digunakan untuk kepentingan masyarakat desa juga Menciptakan lowongan pekerjaan

- 7) Dampak positif pengembangan desa wisata yang pertama adalah tersedianya lapangan pekerjaan baru yang ada di desa. Apabila sebelumnya warga desa hanya mengandalkan hasil pertanian ataupun peternakan, dengan adanya pengembangan desa wisata ini diharapkan mampu menyerap tenaga local yang sudah ada, oleh karena itu di butuhkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas untuk memajukan desa wisata.

• **Dampak Negatif**

- 1) Adanya pencemaran lingkungan
- 2) Banyaknya pengunjung yang berdatangan ke wilayah wisata jika berlebih dan tidak terkontrol dapat berakibat lingkungan menjadi rusak. Tangan-tangan jail pengunjung kadang suka dengan sengaja maupun tidak sengaja merusak fasilitas maupun alam pada wilayah wisata. Salah satu contoh paling sederhana masih banyak kebiasaan pengunjung yang membuang sampah disembarang tempat. Hal ini dapat berakibat merusak wisata yang ada
- 3) Dampak pembangunan pariwisata terhadap lingkungan hidup
- 4) Industri pariwisata memiliki hubungan erat dan kuat dengan lingkungan fisik. Lingkungan alam merupakan aset penting dari pariwisata. Hubungan lingkungan dan pariwisata tidak selamanya saling mendukung dan menguntungkan. Maka dari itu, upaya konservasi, apresiasi, dan pendidikan dilakukan agar hubungan antara pembangunan pariwisata dan lingkungan dapat berkelanjutan.
- 5) Rusaknya kondisi alam.

6) Beberapa kerusakan kondisi alam yang disebabkan karena adanya pembangunan desa wisata diantaranya adalah:

- a. Kerusakan air
- b. Kerusakan atmosfer
- c. Kerusakan vegetasi
- d. Rusaknya kehidupan satwa liar
- e. Berkurangnya lahan perkebunan